

Analisis Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kota Mataram Dengan Pendekatan DPSIR

*Nurul Isnaeni Rahmat¹, Ja'far Luthfi², Supriyadi³, Joni Safaat Adiansyah⁴, Harry Irawan Johari⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Muhammadiyah Mataram

*nurul16543@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-12-2024

Disetujui: 30-02-2025

Kata Kunci:

Pemukiman kumuh
DPSIR
infrastruktur
bencana alam
Air bersih

ABSTRAK

Abstrak: Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Mataram sebagai kota berkembang, yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan keterbatasan lahan untuk pembangunan hunian yang layak. Permukiman kumuh di Kota Mataram ditandai dengan kondisi fisik yang buruk, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar, dan kerentanan sosial-ekonomi penduduknya. Selain itu, kawasan ini juga rentan terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Sandubaya menggunakan pendekatan DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response). Pendekatan DPSIR memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab (driver), tekanan yang ditimbulkan (pressure), kondisi yang ada (state), dampak yang terjadi (impact), serta respons yang telah diambil oleh masyarakat dan pemerintah (response). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama di permukiman kumuh di Kota Mataram meliputi infrastruktur yang buruk, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta kerentanannya terhadap bencana alam. Selain itu, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih juga memperburuk kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Mataram, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh.

Abstract: Slum settlements are one of the major issues faced by Mataram City as a developing urban area, caused by rapid population growth and limited land available for the development of decent housing. Slum areas in Mataram are characterized by poor physical conditions, limited access to basic infrastructure, and the socio-economic vulnerability of their residents. Additionally, these areas are also prone to natural disasters such as floods and landslides, which further worsen living conditions. This study aims to analyze the issues of slum settlements in Sandubaya Village using the DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) approach. The DPSIR approach provides a comprehensive understanding of the driving factors (drivers), the pressures generated (pressures), the existing conditions (state), the impacts experienced (impacts), and the responses that have been taken by the community and the government (responses). The results of this study indicate that the main problems in the slum settlements in Mataram include poor infrastructure, the inability of the community to meet basic needs, and their vulnerability to natural disasters. Moreover, limited access to healthcare, education, and clean water further deteriorates the quality of life for the residents. This research is expected to contribute to formulating more holistic and sustainable solutions in addressing slum settlements in Mataram City, considering social, economic, and environmental aspects comprehensively.

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota berkembang, termasuk Kota Mataram (Warsilah & Nadila, 2019). Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, yang diikuti oleh meningkatnya permintaan akan hunian (Ninggrat et al., 2022). Namun, tidak semua penduduk dapat mengakses hunian yang layak, sehingga muncul kawasan-kawasan permukiman kumuh yang

ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan tingginya kerentanan sosial ekonomi dari masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut (Simiyu et al., 2019).

Permasalahan permukiman kumuh ini sering kali terjadi di lokasi yang rawan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang semakin memperburuk kerentanannya dari sisi sosial dan ekonomi (Abunyewah et al., 2018). Dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan untuk pembangunan, kawasan kumuh ini semakin memperburuk masalah yang dihadapi

kota, baik dari segi fisik, sosial, maupun lingkungan (Giles-Corti et al., 2016). Banyak permukiman kumuh yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan saluran air hujan (Satterthwaite, 2016). Sistem sanitasi yang buruk dan ketiadaan saluran air hujan yang memadai menyebabkan terjadinya banjir di musim hujan dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat (Oyebode, 2018). Sebagian besar warga masih bergantung pada jamban keluarga atau bahkan buang air sembarangan, yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Kualitas air yang digunakan juga sering tercemar, karena banyak rumah yang mengandalkan sumur bor atau sumber air yang tidak terkontrol. Infrastruktur yang buruk ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk kerentanannya terhadap bencana alam dan membatasi kesempatan untuk hidup dengan layak (Hallegatte et al., 2020).

Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh umumnya bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, atau pekerja informal lainnya, dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Nassar & Elsayed, 2018). Pendapatan yang berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak anak-anak yang terpaksa tidak bersekolah atau berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Meskipun terdapat beberapa fasilitas kesehatan di sekitar permukiman, akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas karena jarak dan biaya (Verma & Dash, 2020). Sebagai hasilnya, banyak warga yang lebih memilih pengobatan tradisional atau obat-obatan murah.

Selain masalah infrastruktur dan ekonomi, permukiman kumuh ini juga menghadapi masalah lingkungan yang serius. Sebagian besar kawasan ini terletak di daerah yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Sampah sering menumpuk di sekitar permukiman, dengan banyak warga yang membuang sampah di sungai atau lahan kosong, yang mengakibatkan aliran sungai terhambat dan pencemaran di jalan-jalan (Bempah et al., 2022). Kualitas udara juga buruk akibat tingginya tingkat polusi dari kendaraan dan pembakaran sampah (Chukwu et al., 2022). Selain itu, banyak permukiman yang terletak di bantaran sungai atau daerah pesisir, yang membuat kawasan ini sangat rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai (Islam et al., 2019). Beberapa warga bahkan mengungkapkan bahwa mereka harus menghadapi banjir setiap tahun yang merusak rumah mereka dan mengancam keselamatan.

Kelurahan Sandubaya, sebagai salah satu wilayah di Kota Mataram, merupakan contoh nyata dari kawasan yang menghadapi permasalahan permukiman kumuh. Berbagai indikator, seperti kepadatan bangunan, buruknya infrastruktur dasar, minimnya akses air bersih dan sanitasi, serta tingginya tingkat kemiskinan,

mencerminkan kompleksitas permasalahan permukiman kumuh (Uddin, 2018). Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut.

Untuk menangani permasalahan ini secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Hariram, 2023). Pendekatan DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) merupakan kerangka kerja yang efektif dalam menganalisis permasalahan lingkungan, termasuk permukiman kumuh (Liu et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara faktor-faktor yang mendorong (driving forces) terjadinya permukiman kumuh, berbagai tekanan (pressures) yang ditimbulkan oleh perkembangan perkotaan, kondisi (state) yang ada di permukiman kumuh, dampak (impacts) yang timbul bagi masyarakat dan lingkungan, serta respons (responses) yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut (Quinn et al., 2017).

Pendekatan DPSIR memandang masalah permukiman kumuh sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, seperti faktor sosial-ekonomi, kebijakan publik, kondisi lingkungan, dan kebiasaan masyarakat (Everard et al., 2020). Dengan menganalisis hubungan antar komponen-komponen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi permukiman kumuh, yang tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup perbaikan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh (Putri et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan permukiman kumuh di Kota Mataram dengan pendekatan DPSIR. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika permasalahan permukiman kumuh dan strategi penanganan yang dapat diterapkan secara efektif. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kota Mataram.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui survei primer dan analisis data sekunder, sementara pendekatan kuantitatif memanfaatkan data berbasis angka untuk menganalisis temuan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan di Kelurahan Sandubaya, termasuk pengamatan visual terhadap kondisi lingkungan serta wawancara dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan warga setempat yang

tinggal di kawasan kumuh tersebut. Wawancara mencakup informasi mengenai berbagai aspek, seperti kondisi bangunan, jalan lingkungan, pasokan air bersih, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan perlindungan kebakaran.

Untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan Driver- Pressure- State- Impact- Response (DPSIR) sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan terkait dengan pencemaran, kerusakan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pendekatan DPSIR digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Sandubaya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai komponen-komponen dalam model DPSIR (Pradana et al., 2023). Faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya permasalahan di suatu area, yang mencakup berbagai aktivitas manusia yang memberi tekanan pada lingkungan.

1. Pressure (Tekanan)

Masalah yang timbul akibat faktor pendorong, di mana tekanan ini merupakan efek langsung dari aktivitas manusia yang menghasilkan berbagai masalah lingkungan.

2. State (Kondisi)

Menggambarkan kondisi lingkungan yang ada saat ini, yang mempengaruhi fungsi ekosistem serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

3. Impact (Dampak)

Perubahan yang terjadi akibat kondisi yang ada, baik itu dampak pada lingkungan maupun pada kehidupan masyarakat, yang menjadi dasar untuk menilai kebutuhan akan respons lebih lanjut.

4. Response (Respon)

Tindakan atau respons yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk menangani dampak negatif yang timbul dari masalah tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Mataram adalah salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Secara geografis terletak di ujung barat Pulau Lombok, Bujur Timur 116°04'-116°10', Lintang Selatan 08°33'-08°38', Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 kilometer persegi dan luas perairan 56,80 kilometer persegi. Secara administratif Kota Mataram terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan dan 50 kelurahan. Pembagian terluas adalah Selaparang dengan luas 10,77 km², diikuti oleh Kabupaten Mataram dengan luas 10,77 km². Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 9,46 Km². Dengan jumlah Penduduk

358.205 Jiwa dan kepadatan penduduk 58 Jiwa/Ha. Sedangkan Penduduk 358.205 Jiwa dan kepadatan penduduk 58 Jiwa/Ha. Harap periksa semua gambar dalam paper anda, baik di layar, maupun hasil versi cetak. Ketika memeriksa gambar versi cetak, pastikan bahwa: warna mempunyai kontras yang cukup, gambar cukup jelas, semua label pada gambar dapat dibaca.



Gambar 1. Peta Kota Mataram

1. Profil Permukiman Kumuh Kota Mataram

Penetapan kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan walikota Mataram No.463/IV/2013 tentang lokasi kawasan permukiman kumuh, dengan luas permukiman kumuh Kota Mataram seluas 303.57 Ha. Pada tahun 2016 dilakukan pembahasan delineasi Kawasan Permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Mataram No.463/IV/2015 tentang Penetapan lokasi Kawasan permukiman Kumuh di Kota Mataram periode 2015-2020 dengan luas 803.39 Ha. Hasil Baseline Data 100-100 Program Kotaku dan Hasil kajian Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP). Dari hasil pembahasan delineasi ini, bahwa peningkatan kualitas Permukiman kumuh hingga tahun 2019 seluas 303.57 Ha pada 25 kelurahan dan 499.82 Ha sebagai lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Kelurahan yang paling kumuh dan padat bangunannya adalah kelurahan turida.

Menurut data RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) luasan sebaran Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Mataram seluruhnya Pada tahun 2020, dari hasil evakuasi pengurangan kumuh dimasing-masing kelurahan dan telah dilakukan pembahasan mengenai Kawasan Kumuh periode 2020-2024 berdasarkan keputusan Walikota Nomor 1096/VII/2020 dengan luasan kawasan kumuh 11.60 Ha di 20 Kelurahan. Berikut adalah Tabel Sebaran Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Mataram.

Tabel 1. Sebaran Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Mataram

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas kumuh (2020-2024)
1	Ampenan	Ampenan selatan	3.52
2	Ampenan	Ampenan tengah	-
3	Ampenan	Ampenan utara	-
4	Ampenan	Banjar	6.21
5	Ampenan	Bintaro	4.42
6	Ampenan	Dayan peken	7.40
7	Ampenan	Kebon sari	-
8	Ampenan	Pejarakan karya	-
9	Ampenan	Pejeruk	-
10	Ampenan	Taman sari	-
11	Cakranegara	Cakranegara barat	2.28
12	Cakranegara	Cakranegaraselatan	-
13	Cakranegara	Cakranegara selatan baru	5.06
14	Cakranegara	Cakranegara timur	-
15	Cakranegara	Cakranegara utara	-
16	Cakranegara	Cilinaya	3.25
17	Cakranegara	Karang taliwang	-
18	Cakranegara	Mayura	0.86
19	Cakranegara	Saptamarga	-
20	Cakranegara	Sayang sayang	5.62
21	Mataram	Mataram timur	-
22	Mataram	Pegesangan	-
23	Mataram	Pegesanganbarat	-
24	Mataram	Pegesangan timur	-
25	Mataram	Pagutan	-
26	Mataram	Pagutan barat	-
27	Mataram	Pagutan timur	-
28	Mataram	Pejanggik	-
29	Mataram	Punia	4.39
30	Sandubaya	Abian tubuh baru	7.73
31	Sandubaya	Babakan	5.94
32	Sandubaya	Bertais	8.62
33	Sandubaya	Dasan cermen	5.87
34	Sandubaya	Mandalika	-
35	Sandubaya	Selagalas	9.86
36	Sandubaya	Turida	12.04
37	Sekarabela	Jempong baru	3.78
38	Sekarabela	Karang pule	8.17
39	Sekarabela	Kekalik jaya	-
40	Sekarabela	Tanjung karang	-
41	Sekarabela	Tanjung karang permai	-
42	Selaparang	Dasan agung	-
43	Sekarabela	Dasan agung baru	-
44	Sekarabela	Gomong	-
45	Sekarabela	Karang baru	-
46	Sekarabela	Mataram barat	-
47	Sekarabela	Monjok	4.66
48	Sekarabela	Monjok barat	-
49	Sekarabela	Monjok timur	-
50	Sekarabela	Rembiga	2.92
Total			112.60

Data tersebut di ambil pada tanggal 27 Desember 2024 dan di ambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tabel di ambil pada buku laporan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Mataram. Berdasarkan Tabel 1 Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Mataram diatas menjelaskan bahwa Pemukiman Kumuh yang masih luas adalah Kelurahan Turida Kecamatan

Sandubaya. Hal ini terlihat dalam tabel bahwa Luas Kumuh keluarahan Turida adalah 12.04 ha selanjutnya Kelurahan Selagalas sebesar 9,86 ha. Kedua wilayah tersebut merupakan keluarahan yang ada di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Tabel 4.1 juga menjelaskan bahwa luas pemukiman kumuh di Kelurahan Turida tiap tahunnya tidak mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata kecenderungan luas kumuh yang tetap pada angka tinggi. Hal ini menjelaskan perubahan luas angka kumuh sebelum dan sesudah ada Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencegahan Permukiman Kumuh tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Perda Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 belum efektif terhadap kelurahan Turida.

Tabel 2. Profil Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Mataram

Kota/Kabupaten	: KOTA MATARAM
Jumlah Kelurahan	: 20
Jumlah RT Kumuh	: 170
Luas Kumuh	: 112.6 Ha
Σ Kawasan 10-15 Ha	: 0
Jumlah KRT/KK/Jiwa	: 46778.5/5074/0
Panjang Jalan Ideal	: 54632.8 Meter
Panjang Drainase Ideal	: 46778.8 Meter

Tabel 3. Kondisi Pemukiman Kumuh di Kota Mataram

Kondisi		Permasalahan		
		Jumlah		%
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	5,074	Unit	59 %
	Kepadatan Bangunan	-	Ha	0%
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	538	Unit	7%
Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	605	Meter	1%
Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	37,196	Meter	71%
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,829	KK	16 %
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	450	KK	4%
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	2	Ha	2%
	Ketidaktersediaan drainase	22,984	Meter	48 %
	Kualitas Kontruksi Drainase	19,304	Meter	42 %
KondisiPengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak	1,6	KK	15 %

	Sesuai standar teknis			
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persyaratan Teknis	1,426	KK	13 %
KondisiPengelolaan persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Limbah tidak sesuai dengan persyaratan Teknis	669	KK	5%
	Sistem pengelolaan persampahan yang Tidak sesuai dengan persyaratan teknis	8,042	KK	67 %
KondisiPoteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	77	Unit	1%
	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	360	Unit	2%

Berdasarkan hasil survey lapangan ditemukan sebagian besar rumah di permukiman kumuh di Kota Mataram dibangun dengan bahan yang tidak permanen, seperti bambu, kayu, dan seng bekas. Ukuran rumah yang kecil dan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan beberapa rumah berbagi dinding atau atap. Struktur bangunan yang rapuh menjadikan pemukiman ini sangat rentan terhadap bencana alam, seperti angin kencang atau banjir. Selain itu, sebagian besar permukiman ini tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar. Saluran air hujan yang rusak atau bahkan tidak ada mengakibatkan banjir pada musim hujan. Sistem sanitasi dan pembuangan limbah juga sangat buruk, di mana banyak warga masih menggunakan jamban keluarga atau bahkan buang air sembarangan, yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Sebagian kecil rumah yang terhubung dengan jaringan air bersih dan listrik, sementara sebagian besar masih bergantung pada sumur bor atau sumber air yang tidak terkontrol, yang berdampak pada kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan yang berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak anak-anak di permukiman ini yang tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan, dan tingkat putus sekolah cukup tinggi, terutama di kalangan remaja yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Meskipun terdapat beberapa fasilitas kesehatan di sekitar permukiman,

akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas karena jarak dan biaya. Banyak warga yang lebih memilih pengobatan tradisional atau mengandalkan obat-obatan murah daripada pergi ke pusat layanan kesehatan.

Permukiman kumuh ini umumnya terletak di daerah yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Sampah sering menumpuk di sekitar permukiman, dengan banyak warga yang membuang sampah di sungai atau lahan kosong. Hal ini menyebabkan aliran sungai terhambat dan sampah berserakan di jalan-jalan yang kotor. Banyak sungai yang tercemar akibat sampah domestik, limbah rumah tangga, dan pembuangan limbah industri. Selain itu, kualitas udara juga buruk karena tingginya tingkat polusi akibat asap kendaraan dan pembakaran sampah. Permukiman yang berada di bantaran sungai atau daerah pesisir sangat rentan terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai. Beberapa warga mengungkapkan bahwa mereka harus menghadapi banjir setiap tahun yang merusak rumah dan mengancam keselamatan.

Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Kumuh

No.	Indikator	Persentase	Catatan
1	Keteraturan Bangunan	59%	Masalah: Membelakangi sungai+laut IMB yang tidak diterapkan dengan tegas Kebijakan: Sungai tidak bertanggung: 10 m dari tepi sungai Bertanggung 5 m dari ujung tanggul luar
2	Akses Jalan	71%	Kualitas jalan buruk
3	Genangan	12%	Saluran drainase buruk, kapasitas tidak mencukupi air limpasan
4	Drainase	42%	Masalah: Bercampurnya drainase+air limbah Dimensi saluran terlalu kecil Perencanaan kurang baik Akar Masalah: Kesadaran + pengetahuan masyarakat kurang Buang sampah sembarangan
5	Kebutuhan air minum	4%	Keterbutuhan air minum dari debit air yang masih belum terpenuhi, dikarenakan: Pipa air masih kecil Sambungan kerumah tangga (tersier),ada perda tentang keterpasangan untuk akses air minum Penyebab: Keterbatasan pipa primer Banyaknya permukiman sehingga jaringan itu pun bertambah banyak untuk per RT

No.	Indikator	Persentase	Catatan
6	Limbah Tercampur dengan drainase	13%	Penyebab: Ketidak pahaman masyarakat PHBS Kebijakan pemerintah kurang disosialisasi Akar Masalah: IMB tidak diterapkan Kemampuan ekonomi masyarakat Kesadaran kurang Isu: Program IBD mulai 2018 untuk program sanitasi 1,-Trilyun
7	Persampahan	67%	Masalah: Pengelolaan sampah yang masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan Isu: Penanganan permasalahan sampah di Mataram Tahun 2017 -> motor sampah per lingkungan <u>Masukkandari BPBD:</u> Kebakaran: Pengurangan resiko melalui: Himbauan melalui stiker Jalur evakuasi ditambah/ diperjelas dengan marka jalan Adanya kelurahan tanggung bencana sebagai tempat untuk alat-alat mengatasi bencana Adanya kelompok-kelompok tanggap bencana Ex: 25 anggota untuk membantu saat terjadi bencana, anggota juga difasilitasi dengan HT untuk info/ arahan saat bencana Sudah bekerjasama dengan UGM –Pemda- (Hearingke DPR)- Koordinasi dengan kota pemangku jabatan tentang rencana kedepan. Landasan hukum untuk membangun suatu forum/kelompok (harus ada SK)
8	Kebakaran	2%	

Sumber: Hasil Diskusi Momerandum Program.

Tabel di atas di ambil pada tanggal 27 Desember 2024 dan diambil di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kota Mataram. Tabel di ambil pada buku laporan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Mataram.

2. Pendekatan DPSIR

a. Driving Forces (Faktor Penyebab)

Faktor penyebab atau driving forces merujuk pada kondisi atau perubahan yang mendasari munculnya masalah permukiman kumuh. Faktor-faktor ini sering kali berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, yang mempengaruhi perkembangan

suatu wilayah. Beberapa faktor penyebab utama yang dapat ditemukan di Kota Mataram antara lain:

- 1) Urbanisasi dan Pertumbuhan Penduduk: Meningkatnya jumlah penduduk yang beralih ke kota untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik menyebabkan permintaan akan perumahan meningkat. Ini mendorong terbentuknya permukiman di area yang tidak sesuai dengan standar perumahan sehat.
- 2) Kemiskinan: Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan banyak penduduk berpenghasilan rendah memilih untuk tinggal di permukiman kumuh karena keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak.
- 3) Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan membuat banyak warga melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak memperhatikan aspek sanitasi.

b. Pressures (Tekanan)

Tekanan atau pressures menggambarkan faktor-faktor yang mendorong atau memperburuk kondisi permukiman kumuh yang ada. Tekanan ini bisa berasal dari kegiatan manusia maupun kondisi alam yang mempengaruhi kualitas kehidupan di permukiman kumuh. Beberapa tekanan yang dihadapi di Kota Mataram antara lain:

- 1) Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata: Meskipun Kota Mataram berkembang pesat, distribusi pembangunan infrastruktur, seperti jalan, sanitasi, dan air bersih, tidak merata. Hal ini menambah beban hidup warga di permukiman kumuh, yang seringkali tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap fasilitas dasar.
- 2) Kepadatan Penduduk yang Tinggi: Di banyak permukiman kumuh, kepadatan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan kondisi kehidupan menjadi semakin tidak nyaman dan tidak aman. Rumah-rumah dibangun di lahan sempit dengan sedikit ruang terbuka, yang memperburuk kualitas hidup warga.
- 3) Penyalahgunaan Lahan dan Degradasi Lingkungan: Lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk permukiman, seperti bantaran sungai atau daerah resapan air, seringkali dijadikan tempat tinggal oleh penduduk miskin, yang menyebabkan degradasi lingkungan dan risiko bencana alam.

c. State (Keadaan)

Keadaan atau state menggambarkan kondisi saat ini dari lingkungan dan sosial di permukiman kumuh. Ini meliputi berbagai indikator yang menunjukkan kualitas

hidup penghuni permukiman kumuh. Beberapa keadaan yang dapat ditemukan di permukiman kumuh di Kota Mataram antara lain:

- 1) Kualitas Lingkungan yang Buruk: Pencemaran udara, air yang tercemar, dan minimnya pengelolaan sampah menjadi ciri khas permukiman kumuh. Hal ini mengakibatkan kondisi lingkungan yang tidak sehat dan meningkatkan risiko penyakit bagi penghuni.
- 2) Keterbatasan Akses terhadap Fasilitas Dasar: Banyak permukiman kumuh di Mataram tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, atau fasilitas kesehatan yang dekat, yang mengarah pada ketidaknyamanan dan ketidakamanan.
- 3) Kepadatan yang Tinggi: Kepadatan penduduk yang berlebihan menyebabkan ruang hidup yang terbatas, dengan sedikit ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang memadai. Hal ini memperburuk kondisi kehidupan sosial dan fisik warga.

d. *Impacts (Dampak)*

Dampak atau impacts adalah konsekuensi atau akibat dari permasalahan permukiman kumuh, yang dapat mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa dampak utama dari permukiman kumuh di Kota Mataram antara lain:

- 1) Dampak Kesehatan: Kondisi lingkungan yang buruk, seperti kualitas udara yang tercemar dan air yang terkontaminasi, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi penghuni permukiman kumuh. Penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan demam berdarah menjadi lebih sering terjadi di kawasan ini.
- 2) Peningkatan Kerawanan Sosial: Permukiman kumuh sering kali terisolasi secara sosial dan ekonomi, meningkatkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kerawanan konflik sosial.
- 3) Risiko Bencana Alam: Karena permukiman kumuh sering terletak di daerah yang rawan bencana (seperti bantaran sungai atau daerah pesisir), penghuni menghadapi ancaman yang lebih tinggi dari bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Bencana ini dapat menambah kerugian materi dan bahkan mengancam jiwa.

e. *Responses (Respons)*

Respons atau responses menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau memitigasi masalah permukiman kumuh. Respons ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Beberapa respons yang dapat diambil di Kota Mataram antara lain:

- 1) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Dasar: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan penyediaan air bersih di permukiman kumuh. Hal ini akan membantu mengurangi tekanan terhadap kualitas hidup di kawasan tersebut.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perumahan layak huni sangat penting. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan juga akan sangat membantu.
- 3) Penyediaan Perumahan Terjangkau: Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerjasama untuk menyediakan rumah terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah, dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik.
- 4) Regulasi dan Penegakan Hukum: Penegakan peraturan zonasi dan tata ruang yang lebih ketat akan mencegah berkembangnya permukiman kumuh di area yang tidak seharusnya. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permukiman kumuh di Kelurahan Sandubaya, Kota Mataram, merupakan masalah yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan pendekatan DPSIR, faktor-faktor pendorong utama terbentuknya permukiman kumuh di kawasan ini adalah urbanisasi yang pesat, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta kemiskinan yang membatasi akses penduduk terhadap kebutuhan dasar. Tekanan yang timbul dari kondisi tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, serta sistem drainase yang tidak memadai, yang memperburuk kondisi fisik dan sosial. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerentanannya terhadap bencana alam, kesehatan yang terancam akibat sanitasi yang buruk, dan tingkat kemiskinan yang menghambat perbaikan kualitas hidup.

Oleh karena itu, diperlukan respons yang lebih terpadu antara pemerintah dan masyarakat, dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Solusi jangka panjang yang berkelanjutan harus mencakup perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang ramah dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan

demikian, perbaikan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Sandubaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kerentanannya terhadap bencana alam serta masalah sosial lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram. Dukungan mereka dalam proses administrasi dan pengumpulan data lapangan sangat membantu hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Kami berharap hasil studi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan lingkungan di Kota Mataram dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abunyewah, M., Gajendran, T., & Maund, K. (2018). Profiling Informal Settlements for Disaster Risks. *Procedia Engineering*, 212(2017), 238–245. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.031>
- Bempah, S., Curtis, A., Awandare, G., Ajayakumar, J., & Nyakoe, N. (2022). The health-trash nexus in challenging environments: A spatial mixed methods analysis of Accra, Ghana. *Applied Geography*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102701>
- Chukwu, T. M., Morse, S., & Murphy, R. (2022). Poor Air Quality in Urban Settings: A Comparison of Perceptual Indicators, Causes and Management in Two Cities. *Sustainability (Switzerland)*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/su14031438>
- Everard, M., Johnston, P., Santillo, D., & Staddon, C. (2020). The role of ecosystems in mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses. *Environmental Science and Policy*, 111(May), 7–17. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.017>
- Giles-Corti, B., Vernez-Moudon, A., Reis, R., Turrell, G., Dannenberg, A. L., Badland, H., Foster, S., Lowe, M., Sallis, J. F., Stevenson, M., & Owen, N. (2016). City planning and population health: a global challenge. *The Lancet*, 388(10062), 2912–2924. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30066-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30066-6)
- Hallegatte, S., Vogt-Schilb, A., Rozenberg, J., Bangalore, M., & Beaudet, C. (2020). From Poverty to Disaster and Back: a Review of the Literature. *Economics of Disasters and Climate Change*, 4(1), 223–247. <https://doi.org/10.1007/s41885-020-00060-5>
- Islam, T., Azman, A., Singh, P., Ali, I., Akhtar, T., Rafatullah, M., Ismail, N., & Hossain, K. (2019). Socio-economic vulnerability of riverbank erosion of displacees: Case study of coastal villages in Bangladesh. *Indian Journal of Ecology*, 46(1), 34–38.
- Liu, S., Ding, P., Xue, B., Zhu, H., & Gao, J. (2020). Urban sustainability evaluation based on the dpsir dynamic model: A case study in Shaanxi Province, China. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187460>
- Nassar, D. M., & Elsayed, H. G. (2018). From Informal Settlements to sustainable communities. *Alexandria Engineering Journal*, 57(4), 2367–2376. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.09.004>
- Ninggrat, K., Firmansyah, M., & Mahmudi, H. (2022). The Analysis of Potential Economic Sector Growth Patterns In Central Lombok Regency and Their Correlation with Surrounding Districts in Lombok Island West Nusa Tenggara Provincein 2017-2021. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 6, 145–151. www.ajhssr.com
- Oyebode, J. O. (2018). Strategy for Tackling Flood and Water Scarcity for Adequate Water Supply and Public Health in Nigeria. *European Journal of Advances in Engineering and Technology*, 5(8), 656–664.
- Pradana, I., Prasaningtyas, A., & Ariyaningsih, A. (2023). Analisis DPSIR Untuk Mengetahui Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Pengembangan Kawasan Industri Kariangau. *Ruang*, 9(1), 24–33. <https://doi.org/10.14710/ruang.9.1.24-33>
- Putri, T. S. A., Dida, S., & Anisa, R. (2024). Strategi Komunikasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Dalam Program Kota Sahabat Kusta (KOTAKU) (Studi Kasus Strategi Triple Zero dalam Mencegah dan Mengendalikan Kusta. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4(7). <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/5058>
- Quinn, C. H., Stringer, L. C., Berman, R. J., Le, H. T. V., Msuya, F. E., Pezzuti, J. C. B., & Orchard, S. E. (2017). Unpacking changes in mangrove social-ecological systems: Lessons from Brazil, Zanzibar, and Vietnam. *Resources*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.3390/resources6010014>
- Satterthwaite, D. (2016). Missing the Millennium Development Goal targets for water and sanitation in urban areas. *Environment and Urbanization*, 28(1), 99–118. <https://doi.org/10.1177/0956247816628435>
- Simiyu, S., Cairncross, S., & Swilling, M. (2019). Correction to: Understanding Living Conditions and Deprivation in Informal Settlements of Kisumu, Kenya. *Urban Forum*, 30(2), 243–244. <https://doi.org/10.1007/s12132-018-9360-5>
- Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh: Evidence from Chittagong city. *Journal of Urban Management*, 7(1), 32–42. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.03.002>
- Verma, V. R., & Dash, U. (2020). Geographical accessibility and spatial coverage modelling of public health care network in rural and remote India. *PLoS ONE*, 15(10 October), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239326>
- Warsilah, H., & Nadila, S. M. (2019). Inclusive Urban Coastal Development in Ampenan and Jerowaru, West Nusa Tenggara Province. 365(Icsgs 2018), 162–167. <https://doi.org/10.2991/icsgs-18.2019.22>